



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 217/O/2000

**TENTANG
PENGETAHUAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000**

III. JAWA TENGAH

**DÉPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2000**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 217/O/2000

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), diperlukan pembukaan dan penegarian sekolah tahun pelajaran 1999/2000;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan kabinet periode tahun 1999 - 2004;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi da 1 Tata Kerja Tamatan Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Aparatur Negara dengan surat Nomor 82/M.PAN/11/2000 Tanggal 6 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000**

Pasal 1

- (1) Merbuka Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0295/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Deparmenten Pendidikan Nasional di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegosian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | | |
|----|----------------------------------|---------------|--------------|
| 1. | Taman Kanak-kanak | (TK) Negeri | 235 buah; |
| 2. | Sekolah Luar Biasa | (SLB) Negeri | 38 buah; |
| 3. | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | (SLTP) Negeri | 10.743 buah; |
| 4. | Sekolah Menengah Umum | (SMU) Negeri | 2.907 buah; |
| 5. | Sekolah Menengah Kejuruan | (SmK) Negeri | 794 buah; |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

YAHYA A MUHAIMIN

SAJINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Kepala Badan Kewajiban Negara,
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktur Peribedahai an dan Belanja Negara,
12. Kepala Kantor Perhendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VI DPR-RI,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

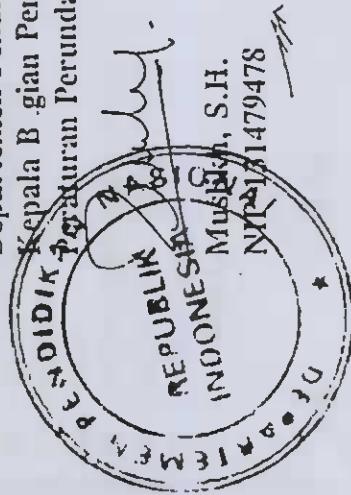
Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bi gian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,



1.	2.	3.	4.	5.
3.	2.	1.	1.	2.
A.	PEMBUKAAN	TK Negeri Sukoharjo	Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
		TK Negeri Purbalingga	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga
		TK Negeri Banjarnegara	Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
		SLTP Negeri 2 Pejawaran	Pejawaran	Kabupaten Banjarnegara
		SLTP Negeri 2 Kemranjen	Kemranjen	Kabupaten Banyumas
		SLTP Negeri 3 Bawang	Bawang	Kabupaten Batang
		SLTP Negeri 4 Ngawen	Ngawen	Kabupaten Blora
		SLTP Negeri 4 Wanasaki	Wanasaki	Kabupaten Brebes
		SLTP Negeri 3 Pulokulon	Pulokulon	Kabupaten Grobogan
		SLTP Negeri 2 Tegalrejo	Tegalrejo	Kabupaten Magelang
		SLTP Negeri 3 Sawangan	Sawangan	Kabupaten Magetan

1	12. SLTP Negeri 3 Salaman	—	Salaman	Kabupaten Magelang
2	13. SLTP Negeri 2 Talun	—	Talur.	Kabupaten Pekalongan
3	14. SLTP Negeri 3 Karangreja	—	Karangreja	Kabupaten Purwalingga
4	15. SLTP Negeri 3 Pulosari	—	Pulosari	Kabupaten Pemalang
5	16. SLTP Negeri 4 Polokarto	—	Polokarto	Kabupaten Sukoharjo
6	17. SLTP Negeri 3 Kaloran	—	Kaloran	Kabupaten Temanggung
7	18. SLTP Negeri 3 Candiroto	—	Candiroto	Kabupaten Temanggung
1	19. SLTP Negeri 3 Kedu	—	Kedu	Kabupaten Temanggung
2	20. SLTP Negeri 3 Sapuran	—	Sapuran	Kabupaten Wonosobo
3	21. SMU Negeri 1 Kemusu	—	Kemusu	Kabupaten Boyolali
4				11.1.2.4251.23.01.03.5
5				11.1.2.4251.23.01.03.5
6				11.1.2.4251.23.01.03.5
7				11.1.2.4251.23.01.03.5
				11.1.2.4251.23.01.03.5
				11.1.2.4251.23.01.03.5
				11.1.2.4251.23.01.03.5

1	2	3	4	5	6	7
		22. SMK Negeri 2 Salatiga	-	Kota Salatiga	Kotamadia Salatiga	11.1.2.4267.2.01.03.5 11.1.2.4267.23.01.03.5
		23. SMK Negeri 1 Bulakamba	-	Bulakamba	Kabupaten Brebes	11.1.2.4267.23.01.03.5 11.1.2.4267.23.01.03.5
		24. SMK Negeri 1 Wanareja	-	Wanareja	Kabupaten Cilacap	11.1.2.4267.23.01.03.5 11.1.2.4267.23.01.03.5
		25. SMK Negeri 2 Wonosobo	-	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	11.1.2.4267.23.01.03.5

1	2	3	4	5	6	7
26.	BENGKULU					
A.	PEMBUKAAN					
1.	SMU Negeri 2 Arga Makmur					
2.	Arga Makmur					
3.	Kabupaten Bengkulu Utara					
4.						
5.						
6.						
7.						
11.1.2.4251.23.01.26.5110						
11.1.2.4251.23.01.26.5120						
11.1.2.4251.23.01.26.5150						
11.1.2.4251.23.01.26.5210						
11.1.2.4251.23.01.26.5220						
11.1.2.4251.23.01.26.5230						
11.1.2.4251.23.01.26.5250						

47

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

四

YAHYA A. MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang – undangan,

